



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI BANTEN**  
**PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

Jalan T. M. P. Taruna No. 7, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118  
[www.pn-tangerang.go.id](http://www.pn-tangerang.go.id), [pn.tangerang@gmail.com](mailto:pn.tangerang@gmail.com)

---

## PENGUMUMAN

SELEKSI CALON PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor : 921/SEK.01.W29.U4/PL1.1.5/XII/2025

Berdasarkan amanat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dengan ini Pengadilan Negeri Tangerang membuka Pendaftaran Calon Penyedia Jasa Pos bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan sebagai berikut :

**A. Umum**

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Konsultan Jasa Pos Bantuan Hukum  
Lingkup Pekerjaan : Pemberi Layanan Bantuan Hukum  
Lokasi Pekerjaan : Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1 A Khusus  
Alamat : Jalan TMP Taruna No. 7 Tangerang  
Nilai Total HPS : Rp. 100.000.000,-  
Sumber Dana : DIPA Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2026,  
No. SP DIPA-005.01.2.099077/2025 tanggal 01 Desember 2025

**B. Formasi Penerimaan**

1. Penyedia Jasa pada Pos Bantuan Hukum berasal dari Lembaga Sipil penyedia Advokasi Hukum dan/atau unit kerja Advokasi Hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultansi dan bantuan hukum di Perguruan Tinggi.
2. Telah memiliki surat pengesahan pendirian badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM
3. Telah terakreditasi sebagaimana SK Menteri Hukum, minimal "B" oleh Kemenkum RI, diutamakan yang terakreditasi "A" oleh Kemenkum RI
4. Memiliki Kantor/Cabang/Perwakilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang.
5. Bersedia memberikan jasa layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tangerang selama tahun anggaran 2026 dan sesuai jam kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang.
6. Petugas pada Pos Bantuan Hukum adalah Advokat, S1 Hukum atau Sarjana Hukum Islam, yang menguasai Hukum dan Memiliki staf atau anggota yang memiliki gelar Sarjana Hukum atau Sarjana Hukum Islam.
7. Petugas pada Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan dan tidak boleh berganti sampai akhir masa kontrak.
8. Penyedia telah terdaftar dalam Aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia-  
<https://sikap.lkpp.go.id> )



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI BANTEN**  
**PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

Jalan T. M. P. Taruna No. 7, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118  
[www.pn-tangerang.go.id](http://www.pn-tangerang.go.id), [pn.tanggerang@gmail.com](mailto:pn.tanggerang@gmail.com)

---

C. Persyaratan

1. Mengajukan surat penawaran yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Up. Pejabat Pengadaan Posbakum TA 2026 Pengadilan Negeri Tangerang yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. Penyedia wajib terdaftar dalam APLIKASI SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia - <https://sikap.lkpp.go.id> )
3. Berbentuk Badan Hukum dengan melampirkan Akta Notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum atau izin pendirian dari Rektor bagi Perguruan Tinggi.
4. Telah terakreditasi minimal "B" oleh Kemenkum RI, diutamakan yang terakreditasi "A" oleh Kemenkum RI.
5. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/perengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi ini, yaitu: Komputer/Laptop, Printer dan Alat Tulis Kantor.
6. Surat keterangan Domisili Lembaga.
7. Melampirkan Fotocopy KTP Pimpinan dan yang akan ditunjuk sebagai petugas Posbakum.
8. Melampirkan daftar nama petugas yang akan ditugaskan dalam Posbakum, sebanyak 20 (dua puluh) orang dan menyediakan minimal 2 orang petugas bantuan hukum di layanan Posbakum yang berada di PTSP.
9. Melampirkan NPWP dan Nomor Rekening atas nama Lembaga.
10. Melampirkan Bukti Setor Pajak Tahunan (SPT).
11. Membuat Surat Pernyataan bersedia menandatangani Pakta Integritas.
12. Tidak masuk dalam daftar hitam, dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
13. Bersedia mengikuti Tes Kompetensi, dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
14. Bersedia menandatangani pernyataan tidak mengajukan keberatan atas hasil seleksi.
15. Bersedia tunduk pada aturan dan ketentuan Pengadaan Jasa Posbakum di Pengadilan Negeri Tangerang.
16. Tidak terafiliasi/tidak mempunyai konflik kepentingan dengan aparaturnya Pengadilan Negeri Tangerang, dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
17. Diutamakan mempunyai inovasi Posbakum yang ditampilkan pada uji kompetensi.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI BANTEN**  
**PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

Jalan T. M. P. Taruna No. 7, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118  
[www.pn-tangerang.go.id](http://www.pn-tangerang.go.id), [pn.tangerang@gmail.com](mailto:pn.tangerang@gmail.com)

---

D. Pendaftaran, Waktu dan Tempat

1. Pemasukan Dokumen Penawaran : 18-23 Desember 2025
2. Berkas Penawaran dan Lampirannya  
ditujukan kepada : Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Up. Pejabat  
Pengadaan Posbakum TA 2026 Pengadilan Negeri  
Tangerang

E. Proses Pengadaan

1. Pembukaan Dokumen Penawaran : 24 Desember 2025
2. Evaluasi Dokumen Penawaran : 24 Desember 2025
3. Tes Kualifikasi : 29 Desember 2025

F. Penetapan Penyedia Jasa dan Penandatanganan SPK

1. Penetapan Penyedia Jasa : 2 Januari 2026
2. Penandatanganan SPK : 5 Januari 2026

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui.

Pejabat Pembuat Komitmen DIPA 03  
Pengadilan Negeri Tangerang  
ttd

Diniarti Mayaciptani

Tangerang, 18 Desember 2025  
Pejabat Pengadaan Jasa Posbakum  
Pengadilan Negeri Tangerang  
ttd

Muhammad Arif Tito Yuliansyah